

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1. Profil Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 1949. Beliau adalah anak satu-satunya atau anak tunggal. Ayahnya bernama Raden Soekatjo dan ibunya bernama Siti Habibah. Sejak dari kecil beliau sudah ingin bercita-cita menjadi seorang tentara. Cita-cita ini lahir dikarenakan kekaguman beliau atas sosok ayahnya, yang mana ayahnya beliau merupakan seorang pensiunan tentara (Letnan). Selain itu, beliau juga mengagumi Jendral (Purn). Sarwo Edhie Wibowo yaitu ayah mertuanya. Menurut beliau, sosok Sarwo Edhie adalah sosok tentara sejati yang memiliki jiwa kemiliteran yang sangat kuat selain itu beliau juga memiliki prinsip-prinsip dan keyakinan yang teguh (Gayatri, 2015).

Susilo Bambang Yudhoyono, beliau adalah lulusan terbaik Angkatan Bersenjata Indonesia (AKABRI) pada tahun 1973. Pada tanggal 30 Juli 1976, beliau menikah dengan Kristiani Herawati atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara, anak dari Jendral (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan Hj. Sunarti Sri Hadiyah. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono memiliki

dua anak laki-laki. Anak pertamanya bernama Agus Harimurti Yudhoyono dan anak keduanya bernama Edhi Baskoro Yudhoyono.

Pada waktu SD beliau bersekolah di Sekolah Rakyat Gajahmada yang sekarang berganti nama menjadi SD Negeri Baleharjo I. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat Gajahmada (SD Negeri Baleharjo I). SBY melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Pacitan. Pada tahun 1968 SBY lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), sejak dari kecil beliau bercita-cita untuk menjadi seorang tentara. Serta berjuang untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang tentara setelah lulus dari SMA. Akan tetapi, beliau terlambat untuk mendaftar. Kemudian beliau menjadi salah satu mahasiswa Teknik Mesin di Institut 10 November Surabaya atau lebih dikenal dengan sebutan ITS Surabaya (Gayatri, 2015).

Namun beliau lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGLSP) Malang. Ketika belajar di PGLSP Malang, beliau mempersiapkan diri untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang tentara. Pada tahun 1970, beliau berhasil masuk AKABRI di Magelang. dengan telah mengikuti tes ujian penerimaan akhir di Bandung. Beliau adalah lulusan terbaik AKABRI pada tahun 1973 dengan mendapatkan bintang Adi Makayasa (Soempeno, 2011).

Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan militernya di *Airbone and Ranger Course* di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1982 sampai 1983 di *Infantry Officer Advanced*

Course di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat, beliau meraih *Honor Graduate, Jungle Warfare Training* di Panama pada tahun 1983. *Anti Tank Weapon Course* di Jerman dan Belgia pada tahun 1984, Kursus Komandan Batalyon di Bandung pada tahun 1985, Seskoad di Bandung pada tahun 1988 sampai 1989. Dan *Command and General Staff College* di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai 1991 (Soempeno, 2011).

Pada tahun 1991 beliau berhasil meraih gelar Master in Management di Webster University di Amerika Serikat. Tidak sampai disitu saja, pada tahun 2004 beliau kembali berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 2005, beliau mendapatkan anugerah dua gelar Doktor Honoris Causa. Ilmu Hukum dari Webster University dan Ilmu Politik dari Thammasat University. Atas pengabdianya sebagai Perwira TNI selama 27 tahun, setidaknya beliau telah meraih 24 tanda kehormatan dan bintang jasa. Antara lain Satya Lencana PBB UNPKF, Bintang Dharma dan Bintang Maha Putra Adipurna dan Bintang Republik Indonesia Adipurna yang merupakan bintang jasa tertinggi di Indonesia (Soempeno, 2011).

Perjalanan karir militer beliau sudah dimulai sejak tahun 1973. Beliau merupakan lulusan dari terbaik dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. Prestasi tertinggi atas gabungan dari mental, fisik serta intelektual di Akademi Militer Indonesia. Beliau menjadi Komandan

Peleton (Danton) Yonif Linud 330 Kostrad pada tahun 1974 sampai tahun 1976. Selesai mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung, beliau kemudian melanjutkan pendidikan *Command and General Staff* di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, kemudian beliau ditugaskan sebagai Koordinator Staff Pribadi Panglima ABRI (Korspri Pangab) (Soempeno, 2011).

Di tahun 1994 beliau diangkat menjadi Komandan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad. Namun pada tahun 1995 beliau ditugaskan ke Bosnia, Herzegovina. Beliau bergabung dengan pasukan perdamaian dari PBB (*United Nation Peace Forces*) pada November 1995 sampai Januari 1996, dimana pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Danrem 072/Pamungkas di Yogyakarta. Setelah kembalinya beliau ke Indonesia, beliau diangkat menjadi Kasdam Jaya Pangdam II Sriwijaya di Palembang dan Kepala Staff Teritorial (Kaster) ABRI. Karir beliau dalam dunia militer terhenti sebagai Kepala Staff Teritorial (Kaster) ABRI dengan pangkat Jendral (Soempeno, 2011).

Tanggal 29 Oktober 1999 beliau diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi tak lama beliau menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, tepat setahun setelahnya pada tanggal 26 Oktober 2000 kemudian beliau diangkat sebagai Menteri Koordinator Publik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) pada susunan kabinet baru di era

pemerintahan Abdurrahman Wahid. Beliau juga membentuk komisi nasional penyelesaian permasalahan Aceh dan Irian, hingga urusan pengungsi dan milisi yang tinggal di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste (Djalal, 2008).

Keluarnya Maklumat Presiden pada tanggal 28 Mei 2001, beliau diminta untuk membentuk *Crisis Center* dimana Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan dan juga hukum mengingat daruratnya situasi politik yang dihadapi oleh pemerintahan. Namun belum genap setahun beliau menjabat sebagai Menko Polsoskam atau lima hari setelah mendapatkan mandat, beliau didesak untuk mundur dari Menko Polsoskam tepatnya pada tanggal 1 Juni 2001. Hal ini terjadi karena adanya ketegangan politik yang terjadi antara presiden dan juga DPR. Kemudian posisi beliau digantikan oleh Agum Gumelar sebagai Menko Polsoskam (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Nama beliau kembali hadir dalam calon wakil presiden untuk mendampingi Megawati. Namun kenyataannya, beliau kalah dalam pemungutan suara. Hamzah Haz yang pada saat itu terpilih sebagai wakil presiden. Sedangkan beliau kembali dipercaya untuk menepati posisi Menteri. Beliau dilantik pada tanggal 10 Agustus 2001 sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Gotong Royong era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Beliau

mengundurkan diri dari Menko Polkam pada tanggal 11 Maret 2004, dan resmi masuk dalam Partai Demokrat. Tanggal 10 Mei 2004 Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkan beliau sebagai presiden dengan kandidat pasangannya adalah Jusuf Kalla (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Pada periode pertama beliau terpilih sebagai presiden dengan wakilnya Jusuf Kalla pada tahun 2004 serta berakhir pada tahun 2009. Dalam pemilu 2009 beliau tidak lagi berpasangan dengan Jusuf Kalla, beliau kembali maju dalam pemilu 2009 sebagai calon presiden dengan Boediono sebagai calon wakil presiden. Pemilihan presiden tahun 2009 terdapat tiga pasangan calon yang bertarung, yaitu Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla dan Wiranto. Pada pemilu 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memperoleh suara sebanyak 60,80%. Dikarenakan pasangan ini mendapatkan suara lebih dari 50% maka pemilu hanya berlangsung dalam satu putaran. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan masa jabatan 2009 hingga 2014. Dengan terpilihnya beliau menjadi presiden, menjadikan beliau sebagai presiden Indonesia yang menjabat selama dua periode berturut-turut. Serta juga menjadikan beliau sebagai presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dengan melalui pemilihan umum secara langsung (DetikNews, 2014).

2. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden Indonesia

Majunya Partai Demokrat dalam pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan langkah awal yang diambil oleh Partai Demokrat dalam memasuki area pesta demokrasi Indonesia. Partai Demokrat termasuk partai baru yang ikut terlibat yang mana partai ini didirikan pada tahun 2001, namun cukup mendapatkan simpati dari masyarakat. Dengan menyosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2004, beliau memenangkan pemilihan tersebut. Terbukti dengan pada putaran pertama unggul dengan perolehan suara mencapai 33,58%. Namun karena pada putaran pertama tidak adanya perolehan suara yang mencapai 50%, maka diadakannya putaran kedua. Dalam putaran kedua lagi-lagi beliau unggul dengan memperoleh perolehan suara sebanyak 60,62% (DetikNews, 2014).

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono didalam partai politik yang menjadi bagian paling penting adalah sikap dan juga akhlak. Artinya politik yang mengedepankan akhlak berarti segala sesuatu yang dilakukan yang memiliki tujuan yang baik dengan mengedepankan pikiran dan hati yang bersih. Jika seseorang telah kehilangan akhlaknya maka orang tersebut akan menjadi buta dalam pengambilan suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan yang diambil akan cenderung kepada keputusan yang bingung dan juga keliru. Seorang pemimpin harus tetap memiliki rasa bertanggungjawab, menghormati orang lain serta menjaga ucapan, karena pada dasarnya ucapan

setiap orang adalah cerminan dari akhlak setiap orang. Sejak dilantiknya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia pada tahun 2004 setidaknya terdapat empat perubahan diri yang dilakukan oleh beliau.

Pertama, beliau menjadikan dirinya sebagai seseorang ekonom. Sebelum beliau menjadi presiden Indonesia, beliau sempat mendapatkan gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mana beliau menulis disertasi tentang ekonomi pertanian. Kedua, beliau mengalami krisis kepemimpinan. Hal ini dimaksudkan dalam kasus tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Beliau dihadapkan untuk menangani kasus bencana alam, dengan latar belakang beliau dari dunia militer tentunya tidak mudah untuk menangani kasus tersebut, belum lagi hal ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Karena sebelumnya presiden-presiden terdahulu juga belum pernah menangani kasus yang serupa. Ketiga, sebagai seorang pemimpin negara, beliau harus selalu mengedepankan dari kepentingan nasional daripada kepentingan partai. Walaupun beliau merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, beliau selalu mengatakan kepentingan negara adalah diatas segalanya daripada kepentingan partai dan juga pribadi. Keempat, beliau menjadi peserta Konferensi Tingkat Tinggi Tsunami, yang diadakan di Jakarta pada tahun 2005. Jika melihat dari keempat hal tersebut, beliau dipaksa untuk melakukan hal-hal baru untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya (Djalal, 2008).

Pembangunan infrastruktur sangatlah berpengaruh dalam bidang perekonomian. Januari 2005 pemerintah Indonesia mengadakan *Infrastructure Summit* yang memiliki tujuan untuk menarik partisipasi dari pihak swasta khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Akan tetapi hal ini gagal dikarenakan adanya kegagalan dari pihak pemerintah didalam penyelenggaraan reformasi dan regulasi yang diperlukan dalam memperbaiki keadaan investasi infrastruktur. Hal ini terjadi disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2004 untuk membatalkan Undang-Undang Kelistrikan yang baru. Dengan demikian menjadikan Indonesia terus mengalami defisit dalam pembangunan infrastruktur. Walaupun beberapa usaha telah dilakukan namun kenyataannya masih banyak kekurangan. Yang pada akhirnya menyebabkan perekonomian di Indonesia terbilang tinggi dan tidak efisien (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Pada bulan Februari 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu reformasi kebijakan yang mana hal ini adalah salah satu langkah untuk mereformasi pertumbuhan perekonomian agar lebih tersistematis. Adapun tiga ciri utama dari reformasi ini antara lain: Pertama, bersifat pada *top-down* ketimbang *bottom-up*. Kedua, adanya tujuan serta jangka waktu yang lebih spesifik. Dan adanya institusi pelaksanaan yang ditunjuk secara khusus. Ketiga, pada masing-masing reformasi adanya *sub-reformasi* yang lebih spesifik dengan target dan sasaran yang telah diukur sebelumnya dengan

didukung langkah yang konkrit. Reformasi kebijakan ini setidaknya melibatkan 85 usaha reformasi. Meliputi Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Bea Cukai serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. 35 dari 85 langkah baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006. Jika dinilai hal ini kurang efektif karena kurangnya kapasitas dan koordinasi dari berbagai kementerian dan lambatnya progres dari DPR (Hill, 2015).

Pada masa kepemimpinan beliau pertumbuhan ekonomi mendapatkan dukungan dari *boom* komoditas dunia khususnya batubara dan minyak sawit serta banyaknya likuiditas pada pasar keuangan internasional. Pada pemerintahan beliau sektor jasa jauh lebih meningkat jika dibandingkan dengan sektor manufaktur. Ini disebabkan karena biaya logistik yang tinggi, keadaan investasi yang kurang kondusif bagi investor asing, dan biaya tenaga kerja yang kurang. Dikarenakan tidak maksimalnya pada pemerintahan beliau dalam menangani kasus tersebut akhirnya berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terjadi tiga perubahan pada politik dan ekonomi yang berdampak pada reformasi ekonomi.

Pertama, adanya perubahan kekuasaan presiden kepada parlemen. Hal ini terjadi atas perubahan dari masa orde baru kepada masa reformasi. Dimasa reformasi kekuasaan presiden mulai dikurangi, yang mana parlemen memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan

reformasi ekonomi tertentu. Hal ini terlihat dari sikap Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai kurang berani untuk melakukan reformasi ekonomi yang diperlukan, dikarenakan adanya ketakutan untuk mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Kedua, keputusan lebih banyak diambil dari berbagai partai politik hal ini dilakukan agar mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Ketiga, adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Yang mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Akibat dari tiga perubahan besar tersebut, adanya ketidaksinambungan antara kementerian. Salah satu contohnya mengenai kebijakan beras. Kementerian Perdagangan berfokus kepada kepentingan konsumen, sedangkan Kementerian Pertanian berfokus dalam peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, terjadi kesulitan dalam melakukan reformasi ekonomi yang sistematis serta komprehensif (Hill, 2015).

Dengan demikian walaupun terdapat dukungan dari *boom* komoditas dunia dan likuiditas global yang banyak, dapat dikatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cukup berhasil dalam melakukan manajemen stabilitas makroekonomi dan dapat meminimalisir dampak krisis finansial global tahun 2008. Akan tetapi pada sisi yang lain, beliau dinilai kurang berhasil dalam pelaksanaan reformasi ekonomi yang lain. seperti memperbaiki keadaan investasi, pembangunan infrastruktur, mengatasi ketimpangan, dan gagalnya melakukan reformasi pajak yang berdampak pada rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap

saja rendah. Akibat kurang beraninya presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reformasi ekonomi yang signifikan terutama pada periode kedua kepemimpinan beliau menjadikan salah satu faktor yang menjadikan terlambatnya laju pertumbuhan Indonesia sejak tahun 2010 (Hill, 2015).

Tabel 2.1 Pendidikan Karir Susilo Bambang Yudhoyono

No	Pendidikan	Tahun
1.	Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri)	1973
2.	American Language Course, Lackland, Texas, Amerika Serikat	1976
3.	Airbone and Ranger Course, Fort Benning, Amerika Serikat	1976
4.	Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, Amerika Serikat	1982-1983
5.	On the job training di 82 and Airbone Division, Fort Bragg, Amerika Serikat	1983
6.	Jungle Warfare School, Panama	1983
7.	Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman	1984
8.	Kursus Komando Batalyon	1985
9.	Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat	1988-1989
10.	Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia, Herzegovina	1995
11.	Asospol Kassospol ABRI/Wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (sidang umum MPR)	1998
12.	Kepala Staff Teritorial (Kaster ABRI)	1998-1999
13.	Menteri Pertambangan dan Energi	1999
14.	Menteri Koordinator Publik, Sosial, dan Keamanan (Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid)	2000
15.	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri)	2001-2004
16.	Presiden Republik Indonesia	2004-2014

Sumber: Info Biografi SBY

Tabel 2.2 Penghargaan Susilo Bambang Yudhoyono

No	Penghargaan	Tahun
1.	Tri Sakti Wiratama (prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual)	1973
2.	Adhi Makayasa (lulusan terbaik AKABRI)	1973
3.	Satya Lencana Seroja	1976
4.	Honor Graduate IOAC, Amerika Serikat	1983
5.	Satya Lencana Dwija Sista	1985
6.	Satya Lencana Santi Dharma	1996
7.	Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF)	1996
8.	Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES)	1996
9.	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya	1998
10.	Bintang Yudha Dharma Nararya	1998
11.	Wing Penerbang TNI-AU	1998
12.	Wing Kapal Selam TNI-AL	1998
13.	Bintang Kartika Eka Paksi Pratama	1999
14.	Bintang Yudha Dharma Pratama	1999
15.	Bintang Dharma	1999
16.	Bintang Maha Putera Utama	1999
17.	Bintang Asia (Star of Asia) oleh BusinessWeek	2005
18.	Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama oleh Sultan Brunei	2006
19.	100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME	2009
20.	Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II	2012
21.	Bapak Demokrasi Indonesia oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia	2012
22.	Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ketahanan Nasional oleh Universitas Pertahanan Indonesia	2014
23.	Global Statesmanship Award dari World Economic Forum (WEF)	2014

Sumber: Info Biografi SBY

Tabel 2.3 Gelar Honoris Causa Susilo Bambang Yudhoyono

No	Gelar Doktor Honoris Causa	Tahun
1.	Doktor Honoris Causa Bidang Hukum dari Universitas Webster, Inggris	2005
2.	Doktor Honoris Causa Bidang Politik dari Universitas Thammasat, Thailand	2005
3.	Doktor Honoris Causa Bidang Kepemimpinan dan Pelayanan Publik dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura	2005
4.	Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dari Universitas Andalas, Indonesia	2006
5.	Doktor Honoris Causa Bidang Pemerintahan dan Media dari Universitas Keio, Jepang	2006
6.	Doktor Honoris Causa Bidang Ekonomi dari Universitas Tsinghua, Tiongkok	2012
7.	Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian dari Universitas Utara Malaysia, Malaysia	2012
8.	Doktor Honoris Causa Bidang Hukum Perdamaian dari Universitas Syiah Kuala Aceh, Indonesia	2013
9.	Doktor Honoris Causa Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Universitas Soka, Jepang	2014
10.	Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Berkelanjutan dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia	2016

Sumber: Info Biografi SBY

B. Presiden Joko Widodo

1. Profil Joko Widodo

Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Kota Solo. Beliau merupakan anak sulung dari empat bersaudara, dengan ketiga adiknya adalah seorang perempuan. Ayah beliau bernama Noto Miharjo dan ibu beliau bernama Sujiatmi. Beliau bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayah beliau merupakan seorang penjual kayu dan bambu di daerah Solo.

Oleh sebab itulah sejak dari kecil beliau tumbuh dan besar dilingkungan yang dekat dengan tukang kayu, sehingga pada akhirnya bisa mengantarkan beliau menjadi seorang pengusaha mebel. Masa kecil beliau banyak dihabiskan di bantaran kali Karanganyar, mulai dari mandi di sungai, memancing ikan, bermain sepak bola dan lain sebagainya (Suwiknyo, 2012).

Pada waktu sekolah dasar beliau bersekolah di SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Solo. Pada sekolah menengah atas beliau bersekolah di SMA Negeri 6 Solo. Setelah lulus dari SMA Negeri 6 Solo, beliau kemudian melanjutkan studinya dengan menjadi salah satu mahasiswa Teknologi Kayu, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dan beliau lulus pada tahun 1985. Setelah lulus dari almahaternya, beliau sempat bekerja di sebuah BUMN di Aceh selama 1,5 tahun terhitung sejak beliau lulus tahun 1985. Pada tahun 1986 beliau menikah dengan Iriana. Beliau memiliki tiga orang anak yaitu Gibran Rakabumi, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep (Suwiknyo, 2012).

Sebelum terjun ke dunia politik beliau sempat menjalani profesi dibidang usaha mebel kurang lebih selama 23 tahun. Beliau dapat dikatakan seorang pengusaha yang sukses dibidang tersebut. Beliau masuk dalam dunia politik sejak tahun 1998. Beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui partai inilah yang pada akhirnya berhasil membawa beliau menjadi Walikota Solo menggantikan Slamet Suryanto

pada tahun 2005. Kota Solo dibawah kepemimpinan beliau mengalami perubahan yang pesat dan signifikan. Dengan menjunjung sebuah moto “*Solo: The Spirit of Java*”. Langkah awal yang dilakukan beliau adalah dengan merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari dengan tujuan untuk merevitalisasi dari fungsi lahan terbuka hijau (Suwiknyo, 2012).

Selain berhasil merevitalisasi taman-taman kota beliau juga membuat *Green Belt* atau Sabuk Hijau di kawasan bantaran sungai. Dibawah kepemimpinannya beliau juga berhasil merevitalisasi kawasan Balekembang. Beliau berhasil merelokasi permukiman liat pada kawasan ini ke tempat yang diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu kawasan yang sebelumnya terlihat kumuh dan tidak tertata, kini menjadi sebuah lokasi yang nyaman bahkan menjadi salah satu paru-paru kota Solo dan daerah resapan air serta kawasan wisata. Tidak hanya itu, beliau juga terkenal dengan prestasinya yang berhasil menanggulangi permasalahan pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya adalah saat menata 5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo tanpa kekerasan, beliau telah memindahkan sebanyak 23 lokasi pedagang kaki lima (PKL) (Suwiknyo, 2012).

Beliau juga berhasil memutus rantai kemiskinan dengan meluncurkan dana untuk biaya pendidikan dan juga kesehatan. Salah satunya program perbaikan gizi anak dan menekan angka kematian ibu dan anak pasca

melahirkan. Lewat inovasi inilah yang pada akhirnya menjadikan beliau layak mendapatkan sebuah penghargaan sebagai Walikota Teladan dari Menteri Dalam Negeri pada April tahun 2011. Beliau dikenal dengan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, beliau mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat salah satunya dengan memperbaiki sumber daya manusianya. Selama menjabat sebagai Walikota Solo beliau mampu menjadikan Solo sebagai kota yang kondusif dan inovatif (Suwiknyo, 2012).

2. Terpilihnya Joko Widodo Sebagai Presiden Indonesia

Pada pemilihan umum presiden tahun 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Terpilihnya Joko Widodo dalam pemilihan presiden tersebut banyak menimbulkan optimisme dari publik. Beliau dinilai sebagai pemimpin yang visioner, mampu mereformasi serta menjalankan program kerja yang nyata dalam penyelesaian masalah yang ada dilapangan. Hal ini didukung atas keberhasilan beliau ketika menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sejak terpilihnya menjadi presiden Indonesia, pastinya terdapat tantangan-tantangan baru baik secara eksternal ataupun secara internal. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat tahun terakhir dari 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5,0% menandakan melemahnya daya beli dari masyarakat. Secara eksternal permasalahan yang dihadapi adalah terlambatnya pertumbuhan ekonomi global. Akibat dari situasi ini membuat Joko Widodo melakukan pendekatan

dengan melakukan reformasi ekonomi domestik dengan berfokus pada penawaran (*supply-side reforms*) dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan keadaan investasi (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Salah satu reformasi yang dilakukan oleh beliau adalah terhadap pemotongan yang signifikan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban fiskal. Joko Widodo melakukan penghampusan subsidi BBM Premium dengan tetap memberikan pada subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar dengan tetap mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga. Dengan reformasi ini terciptanya ruang fiskal yang dibutuhkan untuk membiayai dari agenda pembangunan, khususnya pada pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dengan mencapai 4,7% pada triwulan dua, setidaknya ada dua penyebab hal tersebut. Pertama, belum adanya perbaikan keadaan investasi yang signifikan sampai pertengahan tahun 2015. Disisi lain pembangunan infrastruktur yang masih berjalan lambat. Faktor lainnya adanya ketidaksinambungan antara pernyataan ditingkat Presiden dengan Menteri yang kenyataan pada tingkat pemerintahan lebih rendah dan pemerintah daerah. Sistem perizinan yang rumit, dengan menyita waktu yang cukup banyak serta tingginya biaya yang digunakan secara jelas didalam berbagai sektor (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Faktor kedua adalah rezim perdagangan yang semakin terbatas, khususnya melalui penggunaan hambatan non tarif diberbagai kebijakan impor ataupun ekspor. Sebagai bentuk respon dari hal tersebut, pada September tahun 2015 Joko Widodo kembali melakukan reformasi ekonomi dengan melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Pada Juni 2016 setidaknya terdapat 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan berusaha untuk menyelesaikan masing-masing dari permasalahan yang berbeda-beda. Paket kebijakan pertama (yang paling komprehensif dengan cakupan terluas) memiliki tujuan agar meningkatnya daya saing intrustri dalam negeri, dengan mempercepat proyek strategis nasional, dan meningkatnya jumlah investasi pada sektor properti. Langkah yang diambil dalam paket ini adalah mengurangi segala aturan (deregulasi) dan mengurangi proses kerja yang lambat agar mendapatkan hasil secara lebih cepat (debirokratisasi). Deregulasi dilakukan dengan menghilangkan kebijakan yang berulang, tidak diperlukan, tumpang tindih serta sudah tidak relevan khususnya pada bidang perekonomian. Sedangkan untuk debirokratisasi mencakup dari berbagai prosedur. Hal ini untuk mendapatkan sebuah perizinan, sebagai memfasilitasi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia (Hill, 2015).

Dari 12 paket kebijakan tersebut, pemerintah memiliki target untuk menghasilkan 203 kebijakan yang terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan 49 Peraturan Presiden. Beberapa sektor yang difokuskan adalah infrastruktur, properti, maritim, perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan serta

logistik. Kementerian yang paling banyak dilibatkan adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UMKM, dan Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, reformasi ekonomi yang dilakukan masih memiliki beberapa masalah dalam pengimplementasian, pemantauan, serta evaluasi. Pada 31 Mei tahun 2016 secara resmi pemerintah membentuk empat gugus tugas yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi (Hadi Soesastro dan Sjamsu Rahardja, 2005).

Tabel 2.4 Penghargaan Joko Widodo

No	Penghargaan	Tahun
1.	Satya Bhakti Kadin Jawa Tengah	2007
2.	Solo Pos Award Solo Pos 2007	2008
3.	IKAPI Award	2008
4.	Leadership Awards Menteri Aparatur Negara & Leadership Park	2008
5.	Perhumas Award Perhimpunan Hubungan Masyarakat	2008
6.	Tokoh Pilihan Tempo 2008 Majalah Tempo	2008
7.	Kepala Daerah Tingkat II Terbaik Pengembangan MICE Majalah Venue	2009
8.	Kepala Daerah Berjiwa Entrepreneur Berhasil Property and Bank	2010
9.	Bung Hatta Anti Corruption Award	2010
10.	Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri	2010
11.	Marketer Award Markplus Inc	2010
12.	Alumnus Berprestasi Kategori Penggerak Sosial UGM	2010
13.	Visit Indonesia Mengembangkan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata	2010
14.	IAI Award IAI Jawa Tengah	2011
15.	Inovasi Manajemen Perkotaan Award Kementerian Dalam Negeri	2011
16.	UNS Awards-Tanda Jasa Dharma Budaya	2011

	Bhakti Praja Rektor UNS	
17.	MIPI Awards Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia	2011
18.	Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi Presiden RI	2011
19.	Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Presiden RI	2011
20.	GATRA Award Walikota Terbaik GATRA	2011
21.	Charta Politika Award III Tokoh Kepala Daerah	2012
22.	Pembina Bank Daerah Terbaik I	2012
23.	Anugerah Integritas Nasional	2013
24.	Soegeng Sarjadi Award on Good Governance untuk Kategori Tokoh Inspirasi Pemberdayaan Masyarakat	2012
25.	Tokoh News Maker	2012
26.	Penghargaan Terbaik II “Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 Tingkat Provinsi Kelompok A (DKI Jakarta)	2013
27.	Prominent Figure With Positive Sentiment in Social Media	2013
28.	Jakarta Tahun 2013 dengan Predikat “CC” Menpan Azwar Abu Bakar	2013
29.	Anugerah Parahita Eka Praya 2013 Provinsi DKI Jakarta	2013
30.	Anugerah Tokoh Seputar Indonesia	2013
31.	Provinsi Terbaik Kedua Dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Millenium	2013
32.	Future Gov Award 2013 Provinsi DKI Jakarta He Winner of The Category of E-Government	2013
33.	Rekor Dunia Kepada Pemprov DKI Jakarta Kategori Parade Jenis Busana Tradisional Terbanyak	2013
34.	Tokoh Pelestari Kebudayaan Jakarta	2013
35.	Mens Obsesion Decade Award 2004-2014, Rising Leades	2014

Sumber : Info Biografi Jokowi